

**ANALISIS IMPLEMENTASI WORKING-HOLIDAY VISA (WHV)
MELALUI IA-CEPA TERHADAP PENINGKATAN KERJA SAMA
INDONESIA-AUSTRALIA**



Disusun dan Diajukan oleh

TRI RESKI WIRANI AMIR

E061201052

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI WORKING-HOLIDAY VISA (WHV)
MELALUI IA-CEPA TERHADAP PENINGKATAN KERJA SAMA
INDONESIA-AUSTRALIA**

Disusun dan diajukan oleh :

TRI RESKI WIRANI AMIR

E061201052

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS IMPLEMENTASI WORKING HOLIDAY VISA
(WHY) MELALUI IA-CEPA TERHADAP PENINGKATAN
KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA

N A M A : TRI RESKI WIRANI AMIR

N I M : E061201052

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 25 Juni 2024



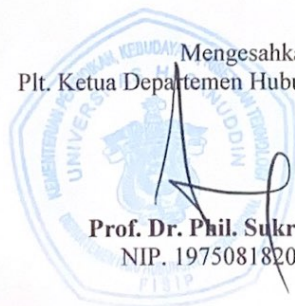
Pembimbing I,

Pembimbing II,

M. Imran Hanafi, MA, M.Ec
NIP. 196307041988037001

Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA
NIDN. 0906108902

Mengesahkan :
Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : ANALISIS IMPLEMENTASI WORKING HOLIDAY VISA
(WHY) MELALUI IA-CEPA TERHADAP PENINGKATAN
KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA

N A M A : TRI RESKI WIRANI AMIR

N I M : E061201052

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 21 Juni 2024.



Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1.M. Imran Hanafi, MA, M.Ec

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Reski Wirani Amir
NIM : E061201052
Jenjang : S1 Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Referensi untuk semua kutipan langsung maupun tidak langsung sudah dicantumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, 27 Juni 2024



(Tri Reski Wirani Amir)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Konseptual	8
1.5 Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Kerja Sama Internasional	20
2.2 <i>Working Holiday Visa</i> (WHV)	26
2.3 Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III IMPLEMENTASI WHV MELALUI IA-CEPA	38
3.1 <i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IA-CEPA)	38
3.2 Kebijakan dan Regulasi WHV	44
3.3 Pelaksanaan Program WHV	50
3.4 Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Australia Melalui WHV	54
BAB IV IMPLEMENTASI DAN DAMPAK WHV TERHADAP PENINGKATAN KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA.....	59
4.1 Kontribusi Migran WHV terhadap Peningkatan Kerja Sama Indonesia – Australia	59
4.2 Peluang dan Tantangan WHV Terhadap Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Australia	70
BAB V KESIMPULAN	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA 83

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta sholawat selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dengan penuh rasa syukur yang mendalam izinkan saya mengucapkan terima kasih atas segala limpahan rahmat, berkah, dan petunjuk-Nya yang telah memungkinkan saya menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Implementasi Working Holiday Visa (WHV) Melalui IA-CEPA Terhadap Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Australia**". Skripsi ini merupakan satu langkah penting dalam perjalanan akademik saya untuk memperoleh gelar sarjana dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini tidaklah mudah. Saya menghadapi berbagai tantangan, hambatan, dan keterbatasan yang menuntut ketekunan, kegigihan, dan kesabaran. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa yang saya terima dari berbagai pihak, saya berhasil menyelesaikannya dengan sukses. Oleh karena itu, dengan rasa kerendahan hati dan penuh syukur, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua yang telah turut berperan serta dalam perjalanan penulisan skripsi ini:

1. Kepada orang tua tercinta, **Ibu Hapidah Djalante** dan **Bapak Amir Iskandar** saya ingin mengungkapkan rasa cinta dan terima kasih yang mendalam atas segala kasih sayang, dukungan, dan bimbingan yang telah kalian berikan sejak saya lahir hingga tumbuh menjadi dewasa seperti sekarang ini. Setiap langkah yang saya ambil selalu didampingi oleh doa,

dukungan, dan pengorbanan dari kalian berdua. Semoga saya dapat membalas segala kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah kalian berikan sepanjang hidup saya, sampai akhir hayat.

2. Kepada kedua kakak saya yang terkasih, **Aidir** dan **Yayan**. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas segala dukungan, bimbingan, dan inspirasi yang telah kalian berikan selama ini. Kakak-kakak saya selalu menjadi teladan bagi saya, dan setiap langkah yang saya ambil tidak pernah lepas dari dorongan dan motivasi dari kalian. Semoga kebaikan dan kebersamaan yang kita miliki terus terjaga dan menjadi sumber kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih atas segala hal yang telah kalian lakukan untuk saya.
3. Keluarga penulis, **Kakak Thiara** sebagai kakak ipar penulis, **Khaif** dan **Kahnivar** sebagai keponakan tercinta dari penulis serta keluarga besar **Djalante**, yang senantiasa menemani, menghibur, dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, beserta jajarannya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan **Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K).**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan **Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt.**, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, dan Wakil Rektor Bidang Kemitraan,

Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Bapak **Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil.**

5. Kepala Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Phil Sukri, M.Si**, beserta jajarannya Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Ibu **Dr Hasniati, S.Sos., M.Si**, Wakil Dekan Bidang Perencanaan , Sumber Daya dan Alumni Bapak **Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si.** dan Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Bapak **Prof. Dr. Suparman, M.Si.**
6. Kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof Darwis, MA, Ph.D** yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi dan memberikan motivasi selama perkuliahan.
7. Kepada Bapak **M.Imran Hanafi MA., M.Ec** selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Atika Puspita Marzaman, S.Ip., M.A** selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga sepanjang proses penulisan. Bapak/Ibu telah sabar mendampingi dan memberikan pencerahan-pencerahan yang sangat berarti bagi perkembangan skripsi ini. Serta kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu dan energi dalam membimbing saya.
8. Kepada seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, yang telah memberikan segala arahan serta ilmu selama perkuliahan berlangsung kepada penulis. Dengan ilmu tersebut sehingga dapat memberikan wawasan terkait penyusunan skripsi ini.

9. Kepada Bapak **Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.SI., MIR** selaku Dosen Penasehat Akademik penulis. Terima kasih atas motivasi dan bimbingannya kepada penulis selama penulis menjalani masa studi.
10. Kepada Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Bu Rahma** dan **Pak Ridho** yang telah membantu segala proses administrasi yang dibutuhkan selama masa studi penulis.
11. Kepada **Na Jaemin**, dan **Jeon Jungkook** saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas dukungannya selama proses penulisan skripsi ini. Meskipun jarak memisahkan kita, namun dukunganmu melalui kata-kata semangat dan dorongan moral sangat berarti bagi penulis. Terima kasih karena telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam menghadapi setiap tantangan.
12. Kepada **NCT, BTS, AESPA, SEVENTEEN**, dan **WAYV** saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang kalian berikan selama proses penulisan skripsi ini. Kehadiran kalian dalam musik selalu menjadi penyemangat bagi saya. Setiap lagu dan karya kalian memberikan inspirasi dan energi positif yang membantu saya melewati setiap tahap penulisan.
13. Kepada **GALAKSI** yaitu **Ale** dan **Dita** yang selalu ada sebagai sahabat yang setia menemani dalam suka maupun duka sejak penulis SMP. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas dukungan dan persahabatan yang telah kita jaga selama ini. Kalian berdua selalu menjadi tempat curahan hati, sumber semangat, dan penyeimbang dalam setiap

langkah perjalanan hidup saya. Terima kasih karena selalu ada dalam suka dan duka, mendengarkan cerita-cerita, dan memberikan nasihat yang berarti, semoga persahabatan ini tetap terjalin dengan baik hingga hari tua, I LOVE YOU GURLS<3.

14. Kepada **GOSTUD** yaitu **Kamila, Beby, Farah, Alike, Afi, Ayu, Dean, Cunnu,** dan **Dean**, terima kasih sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup penulis sejak SMA. Kalian memang teman-teman yang berisik, tapi juga yang paling setia dan selalu mendukung. Setiap momen bersama kalian selalu penuh warna dan berkesan. Trims yah GOSTUD<3.
15. Kepada teman-teman **MINANGKOBOI** yaitu **Ale, Kamila, Dita, Dafa, Aad** dan **Maidas** terima kasih karena senantiasa buat *gimmick* dan bikin lawakan yang lucu maupun tidak lucu. Terima kasih juga selalu memluangkan waktunya untuk bercengkrama bersama (ngopi) dan memberikan *support* yang luar biasa kepada penulis.
16. Kepada teman-teman kuliah penulis yaitu **Rara, Natasya, Dhea, Naufal, Sabbe, Fikri, Lilis** dan juga seluruh teman dari Angkatan **ALTERA 2020** karena telah mewarnai masa perkuliahan penulis yang penuh dengan dinamika. Terima kasih teman-teman karena kalian telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang baru serta unik bagi penulis. See you on top guys.
17. Kepada teman-teman **NCTZEN** yaitu **Muca, Mumu, Juam,** dan **Narli** karena telah menemani konser NCT sehingga memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah menghibur dan

mengajak *fangirling* dan karaoke bareng, disela kesibukan selama perkuliahan, semoga kita bisa ke Korea bersama-sama.

18. Terima Kasih kepada **Unhas MUN Community** beserta seluruh anggota yang tergabung di dalamnya yang telah menjadi tempat belajar dan mengasah *soft skill* untuk penulis. Menjadi bagian dari keluarga organisasi ini merupakan salah satu hal yang paling bermakna bagi penulis selama masa perkuliahan.
19. Kepada **Zhildji**, terima kasih telah menjadi orang yang selalu ada menemani, membantu, dan mendengarkan keluh kesah penulis. Rela menyumbangkan waktu dan tenaga untuk penulis serta senantiasa menyemangati selama proses penulisan skripsi penulis. *May you always be blessed with good health and granted ease in completing your thesis, as well as in achieving all your goals.*
20. Terima kasih kepada bang **Windah Basudara**, *youtuber* favoritku yang selalu menemani dan menghiburku dengan tingkahnya yang lucu dan unik. Perkataan bang Windah telah memotivasi saya, yaitu “Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanya mimpi yang tertunda. Jika kamu gagal, jangan khawatir karena mimpi-mimpi lainnya bisa diciptakan”.
21. *Last but not least to me, myself, and I. I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank myself for never quitting. I wanna thank me for being me at all times.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Working Holiday Visa (WHV) melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) terhadap peningkatan kerja sama antara kedua negara. IA-CEPA, mulai diajukan pada 2007 dan disepakati pada 2019, mencerminkan komitmen mengatasi tantangan kebijakan perdagangan bilateral yang tidak diatur WTO. Penelitian menyoroti peningkatan kuota WHV sebagai dampak positif IA-CEPA dalam mempererat hubungan sosial masyarakat kedua negara serta membuka peluang bisnis dan jasa dagang yang lebih luas. Selain itu, IA-CEPA berdampak positif meningkatkan investasi dan hubungan antar-individu, merangsang pertumbuhan ekonomi melalui investasi di sektor energi, pariwisata, infrastruktur, *e-commerce*, dan pendidikan vokasi dan tinggi. Meskipun dampaknya belum sepenuhnya terlihat, proyeksi menunjukkan potensi IA-CEPA meningkatkan Gross National Product (GNP) Australia dan Indonesia pada 2030. Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman tentang pentingnya kerja sama bilateral dalam hubungan antar-negara serta memberi pandangan luas untuk kebijakan di masa depan.

Kata Kunci: Implementasi, Working Holiday Visa (WHV), Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), kerja sama ekonomi, hubungan antar-negara

ABSTRACT

This research analyzes the implementation of the Working Holiday Visa (WHV) through the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) towards increasing cooperation between the two countries. The IA-CEPA, first proposed in 2007 and agreed in 2019, reflects a commitment to address bilateral trade policy challenges that are not governed by the WTO. The research highlights the increase in WHV quotas as a positive impact of the IA-CEPA in strengthening social relations between the two countries and opening up wider business opportunities and trade services. In addition, the IA-CEPA has a positive impact on increasing investment and people-to-people links, stimulating economic growth through investment in energy, tourism, infrastructure, e-commerce, and vocational and higher education sectors. Although the impact is not yet fully visible, projections show the potential for IA-CEPA to increase the Gross National Product (GNP) of Australia and Indonesia by 2030. This research is important because it provides an understanding of the importance of bilateral cooperation in inter-state relations and provides insights for future policy.

Keywords: *Implementation, Working Holiday Visa (WHV), Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), economic cooperation, relations between countries.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan yang erat selama bertahun-tahun, meliputi berbagai aspek kehidupan baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat sipil. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia telah terjalin sejak tahun 1949, tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia. Awal mula hubungan Indonesia dan Australia terjadi karena Australia merupakan salah satu negara Barat yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme dalam meraih kemerdekaan. Kedua negara memiliki keterkaitan yang kuat dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, budaya, dan pendidikan. Sebagai negara tetangga di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kerja sama lintas batas demi kepentingan bersama. Kerja sama yang terjalin merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan masing-masing negara dan membawa negara menjadi lebih berkembang serta maju ke arah yang lebih baik.

Australia memiliki potensi di banyak bidang seperti ekonomi, pendidikan, perdagangan, politik, pertahanan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia (Astari, 2020). Australia merupakan mitra perdagangan dua arah terbesar ke-12 bagi Indonesia jika diukur melalui dasar skala internasional, dan Indonesia menduduki posisi ke-4 dalam perdagangan antara ASEAN dengan Australia. Pada dasarnya, Indonesia merupakan negara

penting bagi Australia karena secara geografis letak kedua negara berdekatan. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan penting di ASEAN, sehingga dapat membangun jembatan hubungan Australia dengan negara-negara anggota ASEAN. Australia dan Indonesia berbagi perbatasan maritim dan hanya berjarak sekitar 200 km satu sama lain pada titik terdekatnya (*Cape York in Queensland to Papua*). Dengan jumlah penduduk sekitar 271 juta jiwa, yang diproyeksikan oleh PBB (*World Population Prospects 2019*) akan tumbuh menjadi 331 juta jiwa pada tahun 2050, Indonesia akan memainkan peran yang semakin penting bagi Australia.

Meskipun hubungan antara Indonesia dan Australia telah terjalin sejak lama, namun dalam implementasinya hubungan kemitraan dua negara tersebut senantiasa diwarnai oleh berbagai peluang tetapi juga dipenuhi tantangan. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia kerap mengalami pasang surut. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor yang berbeda-beda, seperti faktor letak geografis yang cukup dekat sehingga sering menimbulkan permasalahan teritorial, faktor budaya antara dua negara yang mempunyai standar dan nilai yang berbeda, agama, adat istiadat, faktor kepentingan nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yang selalu mewarnai hubungan kedua negara. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan seperti isu Timor Timur pada tahun 1999, bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, dan pertukaran beberapa pejabat senior Indonesia oleh Australia sehingga mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Australia (Ariani & Elistania, 2019). Tantangan akan selalu ada dalam setiap hubungan yang terjalin antar

negara di dunia. Walaupun demikian, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia hingga dengan saat ini masih terus berjalan dalam berbagai bidang. Di sisi lain, berbagai bentuk kerja sama ekonomi, keamanan, pariwisata memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Salah satu kerja sama ekonomi yang menjadi salah satu titik fokus dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia adalah Implementasi *Working-Holiday Visa* (WHV) melalui *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). WHV memberikan kesempatan bagi warga muda dari kedua negara untuk tinggal dan bekerja sementara di negara mitra untuk sementara waktu tertentu. Dengan adanya WHV, terbuka peluang baru bagi pemuda Indonesia dan Australia untuk mendapatkan pengalaman kerja internasional, memperluas wawasan budaya, dan memperdalam hubungan bilateral antara kedua negara.

WHV merupakan salah satu produk yang tercipta dari perjanjian antara Australia dan negara mitra. Awalnya, visa jenis ini ditujukan untuk pertukaran budaya, kemudian bergeser untuk kebutuhan industri Australia. Pada dasarnya, visa ini memberi waktu satu tahun untuk tinggal di Australia, termasuk enam bulan untuk bekerja dan enam bulan untuk bepergian. Bentuk program ini merupakan hasil kerjasama yang erat antar pemerintah *Government to Government* (G2G) melalui perjanjian atau yang lebih umum juga peraturan mengenai kesepakatan bersama atau timbal balik mengenai fasilitas keimigrasian. Dalam implementasinya, kegiatan program WHV dapat dilakukan lintas batas negara. Oleh karena itu, fasilitas keimigrasian sangat diperlukan khususnya dalam

penerbitan visa tertentu. Pemberian visa tersebut berkaitan dengan visa kerja dan liburan (*work and holiday visa*) yang akan memudahkan setiap penduduk yang berniat untuk mengikuti program WHV. Program WHV merupakan bentuk nyata dari realisasi IA-CEPA.

Dibangunnya IA-CEPA menjadi dasar dari kerangka kerja dalam meningkatkan dan membuka peluang lebih besar untuk kerja sama ekonomi antara bisnis, masyarakat, dan individu bagi Indonesia dan Australia. Selain menyediakan mekanisme baru dalam mengatasi hambatan non-tarif, IA-CEPA juga ada untuk memberikan dorongan besar di berbagai sektor jasa termasuk pendidikan dan pelatihan, pariwisata, keuangan, pertambangan dan energi dengan memastikan Australia berada di posisi yang tepat untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan berbagi dalam pertumbuhan Indonesia. Dengan mendukung rantai nilai yang lebih kuat antara bisnis Australia dan Indonesia yang akan berdampak pada sektor pendidikan, jasa dan ekonomi digital, agribisnis dan pangan, serta sektor lainnya seperti penerbangan dan antariksa khususnya bagi Indonesia. Australia juga mendapatkan peluang besar untuk meningkatkan ekonominya mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat di wilayah. Sehingga dengan adanya IA-CEPA ini tidak hanya sebagai bentuk kerja sama dari kedua negara namun juga sebagai bentuk dari dalam hubungan kedua negara.

WHV merupakan bentuk kerja sama yang terlampir dalam IA-CEPA. WHV adalah jenis visa yang memungkinkan warga negara asing untuk tinggal sementara di wilayah negara mitra dan memiliki kesempatan untuk bekerja,

berlibur, dan belajar di sana selama maksimal 1 tahun. Visa bekerja dan berlibur hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mempunyai pendidikan ketiga dan berumur 18 sampai 30 tahun, yang ingin untuk bepergian dan bekerja selama 12 bulan di Indonesia atau Australia. Kerja sama ini adalah bentuk pertukaran budaya yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah negara-negara terkait (Kemlu-b, n.d).

Dalam konteks kerja sama Indonesia dan Australia melalui IA-CEPA, WHV menjadi salah satu fokus penting. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjelaskan bahwa peningkatan kuota pengajuan WHV dari 1.000 menjadi 4.100 orang merupakan komitmen dari perjanjian tersebut. Peningkatan kuota ini menjadi salah satu manfaat yang diperoleh oleh Indonesia dalam IA-CEPA, sebagai bagian dari upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pertukaran budaya dan pengalaman antar warga negara. Dokumen *side letters* dari IA-CEPA juga mengatur peningkatan kuota WHV secara bertahap dalam enam tahun pertama implementasi perjanjian. Peningkatan ini dimulai dari 4.100 orang pada tahun kedua, kemudian meningkat setiap tahun hingga mencapai 5.000 orang pada tahun keenam dan seterusnya. Penambahan kuota tersebut dilakukan setiap tanggal 1 Juli setiap tahunnya, dan akan dievaluasi dalam tahun keenam persetujuan (Kemlu-b, n.d).

Selain peningkatan kuota WHV, IA-CEPA juga memberikan manfaat lain, seperti alokasi pelatihan dengan kuota 200 orang setiap tahun ke Australia. Pelatihan ini memiliki durasi tinggal selama enam bulan dan ditujukan untuk tenaga kerja di sektor-sektor seperti pendidikan, pariwisata, telekomunikasi,

infrastruktur, kesehatan, energi pertambangan, jasa keuangan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, WHV merupakan salah satu bagian integral dari kerja sama dalam IA-CEPA antara Indonesia dan Australia. Hal ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam mengembangkan hubungan bilateral, pertukaran budaya, dan pengembangan SDM melalui pengalaman kerja dan belajar sementara di negara mitra.

Meskipun telah terjadi peningkatan WHV antara Indonesia dan Australia melalui implementasi IA-CEPA pada tahun 2020-2023, terdapat kebutuhan akan analisis yang lebih mendalam terkait implementasi kerja sama ini dalam konteks ketenagakerjaan. Hingga saat ini, masih terdapat aspek-aspek yang perlu dieksplorasi untuk memahami dampak nyata peningkatan kuota WHV dan alokasi pelatihan dalam sektor-sektor tertentu terhadap perekonomian, pembangunan sumber daya manusia, dan pertukaran budaya antara kedua negara. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian serta dampaknya dalam jangka panjang juga menjadi kekurangan dalam literatur yang ada.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena adanya peningkatan signifikan kuota WHV melalui IA-CEPA antara Indonesia dan Australia, yang memiliki potensi untuk memberikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam pada kedua negara. Pengamatan terhadap pelaksanaan implementasi IA-CEPA dalam hal peningkatan kuota WHV dan alokasi pelatihan menjadi penting untuk memahami sejauh mana kerja sama ini mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia, sektor-sektor ekonomi terkait, serta hubungan antarbudaya antara Indonesia dan Australia. Dengan demikian,

penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam menginformasikan kebijakan serta rencana strategis yang lebih baik dalam mengoptimalkan manfaat dari kerja sama ini bagi kedua negara.

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membatasi diri pada analisis implementasi WHV melalui IA-CEPA terhadap peningkatan kerja sama Indonesia-Australia. Dengan memfokuskan batasan penelitian, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi WHV terkait IA-CEPA dalam mengembangkan kerja sama Indonesia-Australia?
2. Bagaimana dampak WHV dalam kerangka IA-CEPA terhadap peningkatan kerja sama Indonesia-Australia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkaji implementasi WHV melalui IA-CEPA dalam pengembangan kerja sama Indonesia dan Australia.
 - b. Untuk menganalisis dampak dari implementasi WHV dalam kerangka IA-CEPA terhadap peningkatan kerja sama Indonesia-Australia.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat bagi akademisi adalah penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam mengembangkan pemahaman teoritis tentang kerja sama

bilateral dan dampaknya terhadap peningkatan kerja sama antar kedua negara. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian lanjutan di bidang yang sama atau penelitian perbandingan dengan kerja sama serupa di negara lain. Selain itu, hasil penelitian ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi jurusan Hubungan Internasional untuk membantu mahasiswa memahami kerumitan dan dampak kerja sama bilateral dalam praktiknya.

- b. Manfaat bagi praktisi, khususnya pemerintah Indonesia, adalah panduan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif terkait kerja sama WHV dengan Australia, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kerja sama Indonesia dan Australia. Selain itu, organisasi non-pemerintah (NGO) dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merancang program-program yang mendukung pertumbuhan individu dan budaya dalam kerja sama WHV yang berdampak positif pada hubungan Indonesia-Australia.

1.4 Kerangka Konseptual

1. Konsep *Comprehensive Agreement*

CEPA, singkatan dari *Comprehensive Economic Partnership Agreement*, menggambarkan sebuah kerangka kerja sama ekonomi yang melampaui isu-isu perdagangan semata. Biasanya, CEPA dirancang sebagai sebuah konstruksi yang terdiri dari tiga aspek yang saling terkait: akses pasar, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi perdagangan dan

investasi. Kesepakatan ini dapat dilakukan baik secara bilateral antara dua negara maupun dengan blok kerja sama ekonomi yang lebih luas (Kemenkeu, 2013).

Secara umum, CEPA dapat dijelaskan sebagai kesepakatan ekonomi antar negara yang bertujuan untuk mengurangi dan meningkatkan perdagangan bilateral. Berbeda dengan FTA yang hanya bertujuan untuk menghilangkan hambatan tarif, CEPA lebih luas dalam cakupannya. Selain mengurangi hambatan perdagangan, CEPA juga mencakup kerja sama dalam investasi, bantuan ekonomi, teknologi, energi terbarukan, dan lain-lain, sehingga bersifat komprehensif. Perbedaan antara CEPA dan FTA dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.4 Perbedaan Antara CEPA dan FTA

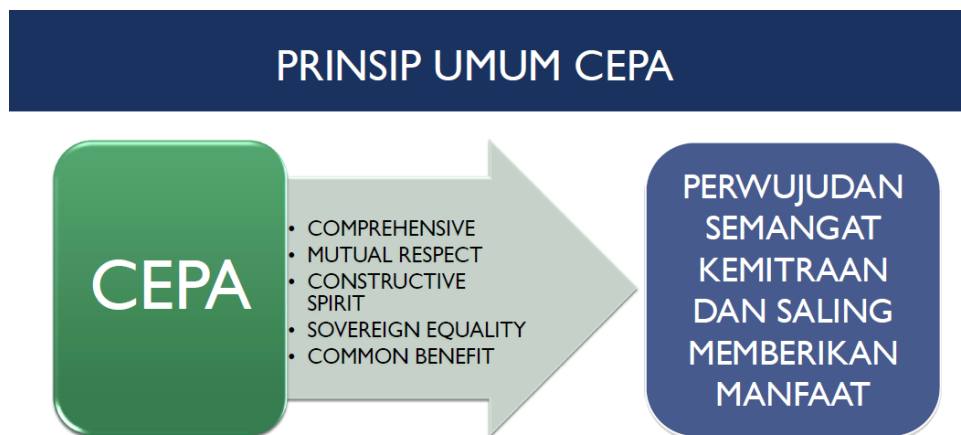
<p><i>Free Trade Agreement</i> (FTA)</p>	<p><i>Comprehensive Economic Partnerships Agreement</i> (CEPA)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Utama: Peningkatan Penetrasi Pasar di antara Negara Anggota dengan Memudahkan Arus Barang/Jasa. 2. Pertimbangan untuk kepentingan Indonesia: cukup banyak produk dan sektor industri Indonesia belum dapat bersaing dan memenuhi standar internasional. 3. Penekanan prinsip Saling Menguntungkan terfokus pada upaya memaksimalkan potensi perdagangan barang/jasa unggulan dari masing-masing pihak untuk disalurkan dan mengisi pasar di negara mitra. Misalnya melalui Penyesuaian Tarif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Utama: Memberikan Manfaat bagi Negara Anggota di Bidang Perekonomian dan Perdagangan. 2. “Kemanfaatan yang Komprehensif”: termasuk untuk membangun sektor industri dan produk Indonesia menjadi lebih kompetitif. 3. Penekanan prinsip pada adanya Perbedaan Tingkat Pembangunan di antara masing-masing pihak sehingga diperlukan upaya Pertukaran yang Berimbang antara pembukaan akses pasar dengan kerja sama pembangunan dan peningkatan kapasitas.

Sumber: (Ghafur, 2016)

Hal ini memberikan pilihan kepada para pemangku kepentingan untuk memilih antara FTA yang cenderung kurang ambisius dan dangkal sebagai respon yang defensif, dan CEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif), yang mirip dengan FTA tetapi dengan manfaat tambahan yang lebih luas dan mendalam sebagai bagian dari strategi yang lebih agresif. Ini menjadi alasan utama bagi negara-negara untuk merancang

CEPA. Adapun prinsip umum dari CEPA tergambar dalam skema berikut ini:

Gambar 1.1 Skema Prinsip Umum CEPA



Sumber: (Ghafur, 2016)

CEPA didasarkan pada prinsip-prinsip umum, termasuk kerja sama yang komprehensif, saling menghormati, semangat membangun, kedaulatan yang setara, dan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak. Ini mencerminkan semangat kemitraan antara kedua pihak yang sepakat untuk saling memberikan manfaat yang saling dirasakan.

Konsep CEPA sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan tentang implementasi WHV melalui IA-CEPA terhadap peningkatan kerja sama Indonesia-Australia. Adapun beberapa alasannya yakni: Pertama, CEPA memberikan kerangka kerja yang melampaui isu-isu perdagangan semata. Dalam konteks penelitian, hal ini relevan karena WHV melibatkan aspek kerja sama ekonomi yang lebih luas daripada sekadar perdagangan barang. WHV melibatkan aspek keberlanjutan kerja sama antara kedua negara dalam hal mobilitas tenaga kerja, peluang

investasi, dan pengembangan kapasitas. Kedua, CEPA mencakup aspek akses pasar, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi perdagangan dan investasi. Implementasi WHV melalui IA-CEPA tidak hanya akan memengaruhi akses pasar untuk pekerja Indonesia di Australia, tetapi juga akan mempengaruhi pengembangan kapasitas tenaga kerja Indonesia dan fasilitasi investasi di kedua negara. Ketiga, CEPA menekankan prinsip saling menguntungkan dan keuntungan bersama. Dalam konteks penelitian, implementasi WHV diharapkan memberikan manfaat yang saling dirasakan bagi Indonesia dan Australia, baik dalam hal pertumbuhan ekonomi maupun dalam hal hubungan bilateral yang lebih kuat.

Dengan demikian, konsep CEPA yang komprehensif dan menyeluruh sangat cocok digunakan dalam penelitian ini karena mencerminkan kompleksitas dan kedalaman hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia melalui WHV. Konsep ini dapat memberikan kerangka kerja yang tepat untuk menganalisis dampak implementasi WHV terhadap peningkatan kerja sama ekonomi antara kedua negara.

2. Konsep Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral merujuk pada interaksi timbal balik antara dua pihak yang saling memengaruhi, seperti yang dijelaskan oleh Perwita (2005). Kehadiran hubungan bilateral ini penting bagi setiap negara dalam memajukan kerja sama lintas negara tanpa mengabaikan kedaulatan dan eksistensi masing-masing. Melalui hubungan ini, negara-negara dapat mengembangkan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

dengan menghormati hak-hak kedua belah pihak. Lebih dari itu, kerja sama bilateral juga berperan dalam mewujudkan perdamaian dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua negara yang terlibat.

Kerja sama bilateral, sebagai pondasi diplomasi tertua, mengacu pada hubungan antara dua negara yang didorong oleh tujuan keamanan dan perdagangan. Seiring evolusi waktu, praktik diplomatik bilateral telah berkembang signifikan, dimulai dari pengangkatan duta tetap oleh negara-negara Italia pada abad ke-15, yang kemudian menjadi kantor kementerian luar negeri di Prancis pada abad ke-17. Konvensi Wina 1961 kemudian menetapkan tugas-tugas diplomasi bilateral, seperti representasi, perlindungan, negosiasi, pelaporan, dan promosi, yang semakin kompleks seiring munculnya agenda internasional yang luas.

Diplomasi bilateral dibangun di atas empat pilar utama, yaitu diplomasi politik, ekonomi, publik, dan konsuler, yang dijalankan melalui institusi-institusi seperti kementerian luar negeri, kedutaan besar, dan konsulat. Meskipun dipengaruhi oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, inti dari tugas-tugas diplomasi tetap bertujuan untuk mengelola hubungan dengan negara asing demi kepentingan nasional. Namun, diplomasi bilateral dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun di tingkat internasional, yang menuntut manajemen diplomasi yang efektif. Ini menunjukkan bahwa kerja sama bilateral

semakin kompleks seiring munculnya aktor-aktor baru dan isu-isu baru dalam urusan internasional.

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia dalam hal ini mencakup berbagai aspek, seperti diplomasi, ekonomi, dan hubungan antarwarga negara kedua negara. Dalam kerangka WHV, kedua negara sepakat untuk memfasilitasi kunjungan sementara warga muda yang memenuhi syarat dari negara mitra untuk bekerja dan berlibur di negara tuan rumah. Ini adalah salah satu bentuk kerja sama bilateral yang memungkinkan pertukaran budaya dan pengalaman antara kedua negara.

Implementasi WHV melalui IA-CEPA memerlukan kerja sama antara pemerintah kedua negara dalam merancang, melaksanakan, dan memantau program tersebut. Ini melibatkan negosiasi antara kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah disepakati.

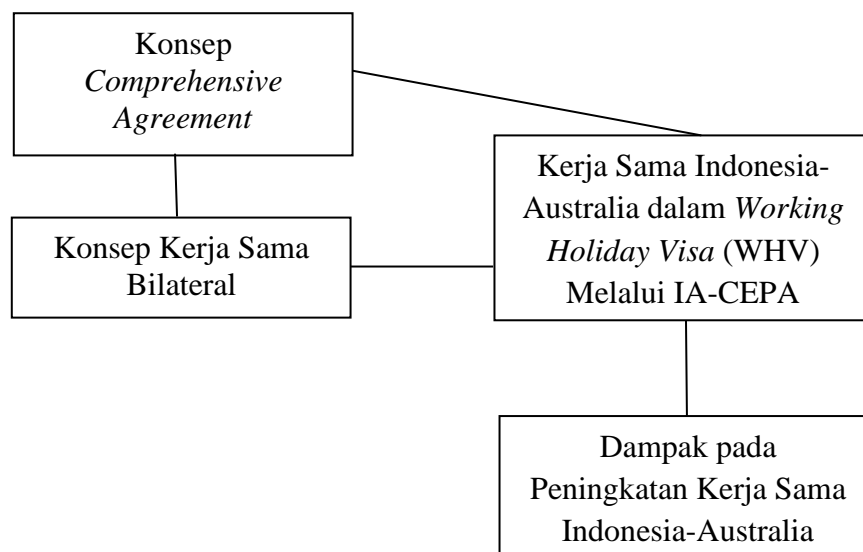
Selain kerja sama antar pemerintah, kerja sama bilateral juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil. Perusahaan-perusahaan dan organisasi non-pemerintah dari kedua negara dapat berperan dalam mendukung pelaksanaan program WHV melalui penyediaan peluang kerja, fasilitas akomodasi, atau dukungan lainnya bagi peserta WHV.

Dengan demikian, studi ini akan mengeksplorasi dinamika kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia dalam konteks implementasi WHV melalui IA-CEPA. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana kerja

sama tersebut direncanakan, dijalankan, dan dievaluasi, serta dampaknya terhadap hubungan bilateral dan pertukaran antarwarga negara kedua negara tersebut.

Berdasarkan penjabaran konsep *Comprehensive Agreement* dan konsep kerja sama bilateral di atas, penulis melihat bagaimana teori dan konsep ini dapat menjelaskan dampak implementasi kerja sama Indonesia dan Australia dalam WHV melalui IA-CEPA terhadap peningkatan kerja sama Indonesia-Australia. Adapun kerangka konseptual untuk penelitian ini sebagai berikut:

Bagan 1.4 Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti,2023

Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Comprehensive Agreement* dan konsep kerja sama bilateral. Kerangka konseptual ini

mengawali dengan kerja sama internasional antara Indonesia dan Australia melalui program WHV melalui IA-CEPA.

Fokus dari penelitian adalah Dampak pada Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Australia, termasuk analisis tentang bagaimana WHV melalui IA-CEPA kemudian akan meningkatkan kerja sama Indonesia-Australia. Kemudian, penelitian ini juga akan mengeksplorasi sejauh mana kerja sama WHV telah berhasil mengoptimalkan hubungan Indonesia-Australia dan apakah kerja sama ini memiliki potensi untuk terus berkontribusi pada peningkatan hubungan yang berkelanjutan.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metode penelitian kualitatif ini berfokus dalam penjelasan mengenai hasil analisis dari serangkaian peristiwa. Dalam penelitian kualitatif, tugas utama penulis adalah menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis peristiwa yang dianggap penting. Oleh karena itu, penelitian harus dilakukan dengan teliti untuk menghasilkan analisis yang lengkap dan merangkum semua hal yang ingin dijelaskan

atau dibahas. Hal ini diperlukan agar dapat memperoleh pemahaman yang kualitatif harus mampu menyajikan data dan informasi secara terperinci dan memperhatikan setiap aspek yang terkait dengan topik penelitian. Dengan melakukan hal ini, penulis dapat menghasilkan laporan penelitian yang komprehensif dan memberikan kontribusi yang signifikan pada pemahaman terhadap topik penelitian yang diangkat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data, seperti yang dijelaskan (Sugiyono, 2018), melibatkan serangkaian langkah penting yang mendukung pemahaman mendalam tentang data dalam penelitian kualitatif. Langkah pertama adalah pengumpulan data. Ini melibatkan metode seperti observasi, wawancara yang mendalam, atau dokumentasi, atau bahkan kombinasi dari ketiganya, yang sering disebut sebagai triangulasi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang kaya dan relevan untuk penelitian.

Selanjutnya, ada tahap reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih, dan memfokuskan pada informasi yang paling penting dan relevan. Ini membantu peneliti untuk memahami esensi dari data yang dikumpulkan dan mempersiapkan diri untuk pengumpulan data selanjutnya. Kemudian, data perlu disajikan dengan baik (*Data Display*). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan

sebagainya. Tujuannya adalah membuat data lebih mudah dipahami dan memberikan gambaran yang jelas.

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif sering kali menghasilkan pemahaman baru atau deskripsi yang lebih mendalam tentang objek penelitian yang sebelumnya mungkin belum terungkap. Dengan demikian, langkah ini membantu menarik kesimpulan yang kuat dari data yang telah dikumpulkan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, peneliti dapat menghadapi tantangan analisis data dalam penelitian kualitatif dengan metode yang sistematis dan terstruktur. Ini membantu memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan bermanfaat.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi literatur dengan mengakses berbagai sumber yang relevan dengan masalah yang diteliti, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen dari berbagai media baik dalam bentuk elektronik maupun cetak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode *Library Research*, di mana penulis melakukan penelaahan mendalam terhadap literatur-literatur yang relevan, catatan-catatan, laporan-laporan, serta dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan kerja sama WHV antara Indonesia dan Australia, serta perjanjian IA-CEPA yang menjadi dasar kerja sama. Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam rangka analisis dampak implementasi kerja sama WHV terhadap peningkatan kerja sama

Indonesia-Australia berdasarkan informasi yang tersedia dalam literatur-literatur terkait.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada analisis mendalam mengenai dampak implementasi kerja sama WHV melalui IA-CEPA terhadap peningkatan kerja sama Indonesia-Australia. Selain itu, penelitian kualitatif ini juga akan memperhatikan aspek-aspek budaya dan sosial yang terkait dengan kerja sama WHV, serta bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi hubungan antara kedua negara dalam konteks kerja sama WHV yang lebih luas.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Penelitian ini akan dimulai dengan merinci secara umum masalah yang akan diteliti, yaitu dampak implementasi kerja sama WHV antara Indonesia dan Australia terhadap peningkatan kerja sama Indonesia-Australia. Penelitian akan menghasilkan suatu kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan deduktif, penelitian ini akan mencoba menghubungkan informasi yang telah ada dengan teori dan konsep yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerja Sama Internasional

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan kerja sama Internasional sebagai alat untuk membantu menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis. Kerja sama internasional adalah hubungan antar bangsa yang mempunyai tujuan berdasarkan kepentingan nasional. Kerja sama internasional terdiri dari seperangkat aturan, prinsip, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang mengatur berfungsinya rezim internasional. Selain itu, negara-negara yang melakukan kerja sama internasional memiliki kesamaan tujuan atau *Common Interest* karena tidak adanya kesamaan kepentingan dalam kerja sama, merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Menurut K.J Holsti kerja sama awalnya terjadi dikarenakan adanya berbagai macam masalah nasional, regional, maupun global yang muncul sehingga memerlukan perhatian tidak hanya dari satu negara, Lalu kemudian setiap negara masing-masing melakukan pendekatan dengan membawa saran atau usul untuk penanggulangan masalah, melakukan negosiasi atau tawar menawar, melakukan perundingan menyimpulkan bukti-bukti yang terkumpul untuk membenarkan salah satu usul yang telah diberikan, dan setelah di ahiri dengan suatu perjanjian yang pada akhirnya memuaskan semua pihak (Holsti, 1998).

Menurut K.J Holsti (1998), kerja sama internasional dapat dijelaskan sebagai sebuah wadah di mana dua atau lebih pihak menyatukan pandangan,

kepentingan, nilai, dan tujuan mereka dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, suatu negara memiliki harapan bahwa kebijakan yang diambil oleh negara lain akan mendukung upaya mereka dalam mencapai kepentingan dan nilai-nilai nasionalnya. Kerja sama ini melibatkan kesepakatan atau penyelesaian masalah tertentu antara dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk memanfaatkan kesamaan kepentingan atau menyelesaikan perbedaan kepentingan. Terdapat peraturan, baik yang resmi maupun tidak resmi, yang mengatur transaksi masa depan yang dilakukan untuk menjalankan kesepakatan ini. Semua transaksi antar negara ini bertujuan untuk memenuhi komitmen dalam kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Kerja sama adalah suatu keharusan dalam konteks hubungan internasional yang muncul karena adanya saling ketergantungan dan meningkatnya kompleksitas dalam masyarakat internasional. Bentuk kerja sama ini dapat melibatkan negara, organisasi, atau individu. Tujuannya adalah untuk mengatasi sejumlah isu yang mencakup aspek ekonomi, keamanan, lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam kerja sama internasional, terdapat berbagai aktor yang terlibat, seperti negara, organisasi non-pemerintah, individu, dan perusahaan. Negara adalah salah satu aktor utama dalam kerja sama internasional, dan dalam upaya kerja sama, mereka cenderung mengarahkan kebijakan luar negeri mereka untuk mencapai kepentingan nasional yang lebih besar. Kerja sama internasional dapat terjadi ketika ada kesamaan kepentingan dan saat melibatkan prinsip-prinsip yang saling menguntungkan semua pihak. Bentuk kerja sama internasional biasanya dapat digolongkan menjadi tiga kategori.

Terdapat tiga bentuk utama kerja sama internasional yang melibatkan negara-negara dalam berbagai konteks. Kerja sama pertama adalah kerja sama bilateral, di mana dua negara membuat perjanjian atau kesepakatan untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan kepentingan khusus kedua belah pihak. Kerja sama ini fokus pada hubungan antara dua negara. Kemudian, terdapat kerja sama regional, yang melibatkan lebih dari dua negara dalam satu kawasan geografis tertentu. Negara-negara dalam kawasan ini berusaha untuk mencapai tujuan bersama dan memecahkan masalah regional dengan mengkoordinasikan upaya mereka. Bentuk terakhir adalah kerja sama multilateral, yang melibatkan sejumlah besar negara yang tidak terbatas oleh batasan wilayah tertentu. Kerja sama multilateral seringkali digunakan untuk mengatasi masalah global yang memerlukan partisipasi luas dari berbagai negara di seluruh dunia. Dalam kerja sama ini, negara-negara bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan saling menguntungkan di tingkat global.

Kerja sama bilateral adalah bentuk kemitraan antara dua negara untuk memenuhi kepentingan bersama dan mencapai tujuan yang sama. Bentuk kerja sama ini melibatkan hubungan politik dan budaya, seperti penandatanganan perjanjian, pertukaran duta besar, dan kunjungan kenegaraan. Kerja sama ini mencakup bidang politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi antara kedua negara, dan merupakan jenis kerja sama internasional yang paling umum. Pilihan lain dari hubungan bilateral adalah kerja sama multilateral, yang melibatkan banyak negara, dan kerja sama unilateral, di mana satu negara bertindak sendiri sesuai keinginannya. Kerja sama dapat terjadi dalam berbagai konteks yang berbeda,

tetapi sebagian besar interaksi kerja sama terjadi antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan (Rudy, 2002).

Model kerja sama lainnya dilakukan oleh negara-negara melalui organisasi dan perjanjian internasional. Beberapa organisasi, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menegaskan bahwa kerja sama antara negara-negara anggotanya didasarkan pada prinsip pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Kerja sama bilateral terjadi antara dua negara berdaulat yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama melalui perundingan, perjanjian, dan langkah-langkah lainnya. Kerja sama ini adalah bentuk hubungan di mana kedua negara saling memengaruhi dan berusaha menciptakan hubungan timbal balik yang ditandai dengan kerja sama. Proses kerja sama bilateral melibatkan respons atau kebijakan aktual dari negara yang menginisiasinya, persepsi terhadap respons tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima, tindakan balik dari negara penerima, dan persepsi kembali oleh pembuat keputusan di negara penginisiasi (Yani & Perwita, 2005). Dalam konteks ini, kerja sama tidak terjadi ketika suatu negara dapat mencapai tujuannya sendiri. Kerja sama terbentuk karena adanya ketergantungan antar negara untuk mencapai kepentingan internal masing-masing. Teuku May Rudy, dalam bukunya "Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin", menjelaskan bahwa setiap negara memiliki tujuan khusus dalam membentuk kerja sama bilateral. Oleh karena itu, setiap negara merancang kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya (Rudy, 2002).

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia dapat kita lihat dari awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, Australia adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Walau Indonesia dan Australia adalah negara yang bertetangga, hubungan kedua negara tidak selalu stabil, hubungan diplomatik keduanya sempat menurun karena konflik Timor Leste dan beberapa peristiwa lainnya karena kesalahpahaman dan perbedaan budaya (Linardy, *et.al.*, n.d). Dengan banyaknya kesalahpahaman tersebut berpengaruh pada hubungan keduanya sehingga kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Australia mengalami kemunduran yang akan berdampak pada hubungan kedua negara ke depannya. Terlepas dari perbedaan dan hubungan yang tidak selalu stabil, Australia dan Indonesia tetap menandatangani Perjanjian Keamanan Australia-Indonesia sebagai bentuk ikatan formal pada Desember tahun 1995. Indonesia dan Australia melakukan banyak kerja sama dan bahkan Australia giat dalam membantu Indonesia, interaksi ini membuat hubungan antara Indonesia dan Australia membaik terlihat dari ditandatanganinya “Perjanjian Lombok” yang berisi tingkat kerangka kerja perjanjian untuk mengatasi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional pada bulan November 2006.

Tepatnya pada 5 Juli 2020, Indonesia dan Australia mulai berfokus dalam pelaksanaan kerangka kerja sama ekonomi komprehensif IA-CEPA. Kerangka kerja ini tidak hanya menyangkut perdagangan barang dan jasa saja namun juga pendidikan dan pelatihan kejuruan (VET), pariwisata, jasa keuangan dan lainnya antara kedua negara. IA-CEPA ada untuk memperluas dan mendiversifikasi pasar masing-masing serta memperkuat kemitraan ekonomi yang diharapkan dapat

memberikan peluang bagi bisnis Australia dan Indonesia. Pengurangan hambatan dagang seperti pengurangan tarif dan bebas bea cukai serta akses pasar yang ditingkatkan masuk ke dalam ketentuan IA-CEPA (kemlu-a, n.d). Dalam pembuatan sampai penerapan IA-CEPA Indonesia dan Australia melewati banyak pertemuan dan negosiasi yang menggambarkan bagaimana kedua negara ingin untuk melakukan kerja sama dengan satu dengan yang lainnya. Pembentukan IA-CEPA pada tahun 2005 sebagai inisiasi Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia, John Howard. Mereka sepakat untuk meningkatkan hubungan perdagangan antar kedua negara yang dimana perundingan pertama dilakukan pada 2 Desember tahun 2010 yang dilakukan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Julia Gillard lalu perundingan kedua dilangsungkan pada tahun 2013. Namun perundingan mengenai IA-CEPA sempat terhenti karena adanya perubahan dinamika politik antara kedua negara (bappenas, 2021).

Hubungan kedua negara mengalami kerenggangan kembali setelah berbagai peristiwa terjadi yang berakhir dengan penarikan duta besar Indonesia di Australia setelah penyimpanan dokumen Edward Snowden yang menunjukkan adanya pengawasan jaringan telepon Presiden Indonesia oleh pihak Australia pada tahun 2013 terungkap. Peristiwa ini semakin membuat tensi yang tinggi karena Perdana Menteri Abbott juga menolak untuk memberikan permintaan maaf. Kemudian ketegangan dilanjutkan dengan Indonesia mengabaikan pengajuan pengampunan untuk terpidana Andrew Chan dan Myuran Sukumaran oleh Abbott menyusul Schapelle Corby yang diizinkan kembali ke Australia pada Mei 2017

sesudah hukumannya dikurangi dan dia dibebaskan secara bersyarat pada tahun 2014 setelah melakukan pengadilan di tingkat banding pada kasus penyelundupan narkoba di Bali. Tetapi pada 16 Maret 2016 perundingan dilanjutkan kembali dengan melibatkan pelaku usaha *Indonesia-Australia Business Partnership Group* (IA-BPG) untuk memberikan pandangan dan masukan mengenai kelayakan IA-CEPA. Lalu kedua negara menyepakati substansi dasar IA-CEPA pada Juli 2018 dalam pertemuan kedua belas, tidak lupa Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Australia secara aktif seperti KTT G20 di Brisbane 2014, kunjungan kenegaraan ke Australia pada tahun 2017, KTT Khusus ASEAN-Australia 2018, dan mengunjungi Australia sebagai Tamu Pemerintahan pada Februari 2020, serta promosi pentingnya IA-CEPA sebagai perjanjian di luar penghapusan tarif dan penghambatan yang dilakukan oleh duta besar Indonesia untuk Australia. Penyelesaian perundingan IA-CEPA diumumkan oleh Perdana Menteri Scott Morrison dan Presiden Jokowi pada 31 Agustus 2018. Lalu Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia, Simon Birmingham melakukan penandatanganan IA-CEPA pada 4 Maret 2019. Dimana Australia melakukan ratifikasi IA-CEPA November 2019 dan Indonesia pada Februari 2020, dengan persetujuan Senat Australia dan Parlemen Indonesia pada penerapan undang-undangnya. Kebijakan IA-CEPA mulai diberlakukan dari 5 Juli 2020 (bappenas, 2021).

2.2 Working Holiday Visa (WHV)

The working holiday merupakan bentuk mobilitas transnasional yang relatif baru namun berkembang pesat. *Working holiday*, atau yang dikenal juga

sebagai *gap year*, adalah kunjungan ke luar negeri yang berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama daripada visa turis biasa, yang memberikan hak untuk bekerja secara sementara di negara tersebut. Meskipun sebagian pengunjung *working holiday* memilih untuk tinggal selama satu tahun atau lebih, ada juga yang hanya tinggal beberapa bulan. Di Australia, program *working holiday* dapat melibatkan berbagai jenis pekerjaan, seperti purnawaktu, paruh waktu, sukarela, atau tanpa bekerja sama sekali (Dobihal, n.d).

Program *Working Holiday Maker* (WHM) Australia telah menarik generasi muda dari negara-negara mitra sejak dimulainya pada tahun 1970an. WHV Australia merupakan bagian dari Program Pembinaan *Working Holiday* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Australia. Di Australia, program *working holiday* pertama dimulai pada tahun 1975 dengan diperkenalkannya WHV (*subclass* 417), yang kemudian muncul sebagai program migrasi wisatawan yang "memfasilitasi pertukaran budaya antara Australia dan negara-negara mitra, dengan penekanan khusus pada kaum muda" ke Australia, ditambah dengan kesempatan untuk bekerja (Vosko, 2023). Tujuannya adalah untuk mendorong pengeluaran wisatawan muda untuk perjalanan domestik dengan memungkinkan mereka "melakukan pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan uang liburan mereka." Meskipun tujuan utama program tersebut adalah meningkatkan pertukaran budaya di kalangan generasi muda, WHV tidak hanya diizinkan untuk melakukan studi jangka pendek, tetapi juga bekerja di negara tersebut untuk menambah dana perjalanan mereka, yang tidak diizinkan oleh visa turis lainnya.

12 negara sumber teratas (*subclass 417*) *working holiday* Australia pada saat itu adalah Inggris, Korea Selatan, Jerman, Irlandia, Prancis, Taiwan, Kanada, Jepang, Italia, Swedia, Hong Kong, dan Belanda. Jepang memulai program liburan kerja pertama kali dengan Australia pada tahun 1980. Persyaratan kelayakan dasar untuk subkelas 417 menyatakan bahwa pelamar harus: berusia 18–30 tahun pada saat melamar, tidak didampingi oleh anak-anak yang menjadi tanggungannya selama berada di Australia, memenuhi persyaratan kesehatan, kepribadian dan keuangan, serta mempunyai cukup uang untuk membeli tiket pulang pergi atau tiket pulang sebenarnya (Robertson, 2014). Kemudian pada tahun 2005, pemerintah Australia mengembangkan program *working holiday* yang baru dan lebih ketat (dalam hal kriteria dan kuota) yang disebut WHV (*subclass 462*), di mana semua perjanjian WHV kembali dinegosiasikan. Pada tahun tersebut, izin masuk kedua hingga 12 bulan diperbolehkan berdasarkan WHV (*subclass 417*) yang asli. Peserta WHV yang pertama kali muncul adalah “pekerjaan khusus,” yang menurut peraturan setara dengan 3 bulan (atau 88 hari) kerja penuh waktu di “wilayah regional”, berhak untuk diperpanjang. ‘Pekerjaan khusus’ tersebut mencakup pekerjaan di bidang budidaya tanaman dan hewan, perikanan dan mutiara, atau pertambangan dan konstruksi. ‘Regional Australia’ mencakup ruang geografis yang luas, termasuk ibu kota dan daerah pinggiran kota di beberapa negara bagian.

WHV Australia merupakan bagian dari Program Pembinaan *Working Holiday* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Australia. Program ini merupakan pertukaran budaya yang memungkinkan para pelancong muda untuk menjalani

liburan yang panjang sambil bekerja untuk menghasilkan uang selama kunjungan mereka di Australia. *Visa working holiday* merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk tinggal di Australia lebih lama daripada yang diizinkan oleh visa turis, atau untuk mendapatkan izin untuk bekerja selama liburan. Australia menawarkan dua jenis *visa working holiday* yang berbeda, yaitu *Visa Working Holiday (subclass 417)* dan *Visa Kerja dan Liburan (subclass 462)*. Kelayakan untuk mendapatkan visa ini bergantung pada kewarganegaraan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web resmi Kementerian Dalam Negeri Australia (Dobihal, n.d).

Program WHV merupakan hasil kerja sama antara pemerintah ke pemerintah melalui perjanjian yang mengatur hubungan timbal-balik terkait fasilitas imigrasi untuk mendukung implementasi program ini. Dalam prakteknya, program ini melibatkan aktivitas lintas batas negara atau *cross-border*. Oleh karena itu, fasilitas imigrasi, terutama dalam pemberian visa tertentu, sangat penting dalam program ini (Zaini, 2023). Pemberian visa kerja dan liburan ini memudahkan setiap penduduk untuk ikut serta dalam program tersebut. Visa ini memungkinkan tinggal dengan waktu yang telah ditentukan dalam program, dan dapat digunakan untuk liburan serta untuk melaksanakan program pelatihan kerja dengan jenis dan jadwal yang telah diatur. Persyaratan untuk mendapatkan visa ini mencakup ketentuan kuota visa dan surat dukungan dari pemerintah masing-masing, sesuai dengan perjanjian yang ada (Zaini, 2023).

Program WHV merupakan salah satu aspek dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia yang dapat dihubungkan dengan Pembahasan "Kerja

Sama Bilateral antara Indonesia dan Australia" pada penelitian yang berjudul "Analisis Implementasi WHV melalui IA-CEPA Terhadap Peningkatan Kerja sama Indonesia-Australia" secara substansial. Kerja sama bilateral antara kedua negara telah terbentuk sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, meskipun terdapat tantangan dan kesalahpahaman yang perlu diatasi, terutama terkait dengan peristiwa seperti konflik Timor Leste dan perbedaan budaya. Untuk mengatasi kemunduran hubungan tersebut, Indonesia dan Australia menandatangani Perjanjian Keamanan pada tahun 1995 dan Perjanjian Lombok pada tahun 2006 sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam menghadapi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional. Berdasarkan perjanjian antara Australia dan Indonesia terkait dengan program WHV, efektif mulai tanggal 1 Juli 2009, visa tersebut dikeluarkan untuk warga negara Australia yang berkunjung ke Indonesia dan warga negara Indonesia yang berkunjung ke Australia.

Salah satu inisiatif kerja sama yang signifikan antara Indonesia dan Australia adalah implementasi IA-CEPA yang dimulai pada 5 Juli 2020. IA-CEPA tidak hanya berfokus pada perdagangan barang dan jasa, tetapi juga mencakup bidang pendidikan dan pelatihan kejuruan, pariwisata, jasa keuangan, dan lainnya. Melalui IA-CEPA, kedua negara berusaha untuk memperluas pasar dan memperkuat kemitraan ekonomi, memberikan peluang bisnis bagi kedua belah pihak, dan mengurangi hambatan dagang seperti tarif dan bea cukai.

Dalam konteks ini, Program WHV menjadi relevan karena merupakan salah satu aspek implementasi IA-CEPA yang dapat meningkatkan kerja sama

antara Indonesia dan Australia dalam bidang pariwisata, pendidikan, dan pelatihan kejuruan. WHV memungkinkan warga muda dari kedua negara untuk mengunjungi dan tinggal sementara di negara lain sambil menghasilkan uang melalui pekerjaan jangka pendek. Hal ini tidak hanya memberikan pengalaman budaya yang berharga bagi peserta, tetapi juga memperluas hubungan antara Indonesia dan Australia melalui pertukaran sosial dan ekonomi yang positif. Dengan demikian, WHV dapat dianggap sebagai salah satu bentuk implementasi konkret dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia yang diatur dalam IA-CEPA.

Selain WHV antara Indonesia dan Australia, terdapat implementasi WHV yang juga terjalin antar berbagai negara lainnya dalam hubungan internasional. Contohnya adalah WHV Selandia Baru dengan Tiongkok sebagai peminat utamanya. Tujuan Tiongkok menjalin kerja sama WHV dengan Tiongkok adalah sebagai strategi agar warga negaranya (pemuda) dapat bekerja sambil bepergian dan bisa mensubsidi biaya perjalanan dengan bekerja. Program WHV Tiongkok-Selandia Baru telah diterapkan sejak tahun 2008 hingga dengan saat ini. Pada awal diterapkan, Selandia Baru hanya memberikan 1000 kuota WHV di Tiongkok setiap tahunnya. Hingga pada akhir tahun 2015, kuota WHV Selandia Baru kepada Tiongkok meningkat menjadi 7000 kuota setiap tahunnya. Pada implementasi WHV Tiongkok-Selandia Baru, terbukti bahwa WHV memberikan manfaat meskipun prosesnya dinilai sangat rumit yang tercermin dalam banyak hal. WHV memiliki kekhasan dan terkait erat dengan pengalaman peserta WHV sendiri serta faktor lingkungan (Yang & Wen, 2016).

Kemudian juga terdapat implementasi dari program WHV antara Kanada dengan Irlandia. Perjanjian kerja sama WHV Irlandia sendiri terjalin tidak hanya dengan Kanada, tetapi juga dengan sejumlah negara di dunia. Tujuannya adalah untuk memungkinkan warga negara Irlandia (pemuda) dapat melakukan perjalanan ke negara lain lebih lama dari bisa turis, juga kemungkinan untuk dapat bekerja selama perjalanan tersebut yang penghasilannya dimanfaatkan untuk menunjang biaya perjalanan. Selain Kanada, Irlandia menjalin perjanjian WHV dengan Argentina, Australia, Chile, Hong Kong, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat. Perjanjian program Liburan Kerja Kanada dan Irlandia ditandatangani pada tahun 2003 dan dilaporkan dimulai dengan 100 tempat untuk warga negara masing-masing negara. Program WHV antara Kanada dan Irlandia sendiri semakin dipromosikan sejak tahun 2012, saat Menteri Imigrasi, Kewarganegaraan dan Multikulturalisme Parta Konservatif Kanda, Jason Kenney melakukan perjalanan ke Irlandia dengan tujuan promosi dan perluasan program WHV Kanada-Irlandia. Aksi tersebut bagian dari upaya yang lebih luas untuk merekrut tenaga kerja Irlandia yang digambarkan dengan “imigrasi sistematis berdasarkan perekrutan yang lebih aktif.” Melalui perjanjian mobilitas bilateral dengan program WHV ini, negara tujuan WHV menawarkan hak-hak istimewa untuk masuk, bekerja, dan tinggal sementara waktu yang telah dibatasi sesuai persyaratan program WHV bagi “pemuda” (dalam kasus program WHV Kanada dengan rentang usia kelayakan berkisar antara 18 hingga 35 tahun) (Helleiner, 2015).

2.3 Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka atau studi sebelumnya merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan, mengorganisir, dan mengidentifikasi kesenjangan dalam konsep atau kerangka teoritis. Ini memberikan gambaran singkat tentang literatur ilmiah yang terkait dengan topik penelitian, memungkinkan pembaca untuk melihat perdebatan teoretis utama atau relevansi dengan pertanyaan penelitian yang telah diajukan oleh peneliti lain (Lamont, 2015). Pada penelitian ini, penelitian terdahulu yang akan digunakan oleh penulis yakni merupakan beberapa penelitian serupa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dalam bentuk jurnal, hal ini dilakukan sebagai bahan perbandingan peneliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu tersebut yakni sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul *“Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA) in Economic Recovery During the Covid-19 Period”* yang ditulis oleh Dwi F. Moenardy, Sintia Catur Sutantri, Gilang Nur Alam, dan Denny Saputera pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak perjanjian IA-CEPA dalam memulihkan kondisi ekonomi selama periode Covid-19, terutama dalam bidang perdagangan, investasi, kesehatan, dan pariwisata. IA-CEPA, yang mulai berlaku pada 5 Juli 2020, merupakan kemitraan komprehensif antara Indonesia-Australia dalam bidang perdagangan barang, investasi, jasa, dan juga kerja sama ekonomi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur. Analisis dalam penelitian ini adalah kerja sama internasional dan hubungan

bilateral. Selain membahas perdagangan barang, perjanjian IA-CEPA juga mendorong kemitraan strategis dalam bidang investasi, ekonomi, kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kerja, perdagangan jasa, transportasi, pariwisata, dan lain-lain. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa IA-CEPA memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan ekonomi selama periode Covid-19. Di sektor investasi dan perdagangan, Australia memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk membantu dunia usaha. Di sektor kesehatan, kerja sama difokuskan pada produksi masker, alat medis, dan tenaga medis. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, kedua negara berusaha meningkatkan kunjungan wisata dengan tetap memperhatikan kesehatan, keamanan, dan kebutuhan pariwisata. Dengan demikian, penandatanganan IA-CEPA menggambarkan realisasi hubungan bilateral yang baik di mana kedua negara berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi selama periode Covid-19.

Kedua, penelitian yang berjudul “**Dampak WHV (Work Holiday Visa) Terhadap Hukum Internasional**” yang diteliti oleh M. Rizky Zaini pada tahun 2023. Penelitian ini membahas program kerja sama antara Indonesia dan Australia melalui IA-CEPA, yang antara lain menghasilkan penambahan kuota visa WHV bagi pemuda Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja dan berlibur di Australia. Pemerintah Australia telah mengkonfirmasi peningkatan jumlah kuota WHV, dari 1.000 orang pada tahun pertama menjadi 4.100 orang, dengan rencana kenaikan hingga 5.000 dalam enam tahun. Meskipun peningkatan ini merupakan bagian dari perjanjian dagang baru antara kedua negara, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji dampak WHV terhadap hukum internasional,

sehingga hal ini menjadi perhatian yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-yuridis, yang akan membantu dalam menganalisis implikasi hukum dari implementasi program WHV ini. Program WHV ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemuda Indonesia untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum internasional dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara.

Ketiga, penelitian yang berjudul “**Kerja Sama Bilateral Indonesia dan Australia dalam IA-CEPA**” yang ditulis oleh Gisella Linardy, Jeannifer Lauwren, Tasya Caroline, Jessica Friesca Hana Dayoh, dan Rotua Isaura Yemima pada tahun 2021. Jurnal ini membahas peningkatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia melalui pembentukan IA-CEPA yang berlaku sejak 5 Juli 2020. Penelitian ini akan menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang muncul selama pemberlakuan IA-CEPA. Tujuannya adalah agar Indonesia dapat memanfaatkan hubungan baiknya dengan Australia di sektor pariwisata dan pendidikan untuk memaksimalkan keuntungan sebagai mitra dagang utama Australia. Seiring dengan itu, Indonesia juga perlu memperhatikan defisit dalam neraca perdagangan, pandangan negatif masyarakat Australia terhadap Indonesia, dan kemungkinan dominasi pasar Indonesia oleh produk Australia agar dapat menghindari kegagalan dalam implementasi IA-CEPA. Analisis ini menunjukkan bahwa hubungan diplomasi dalam IA-CEPA didasarkan pada kepentingan

ekonomi kedua negara, yang terus dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Perbedaan utama antara jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus penelitian. Jurnal tersebut lebih menyoroti hubungan ekonomi dan diplomasi antara Indonesia dan Australia secara umum melalui IA-CEPA, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih difokuskan pada analisis implementasi WHV melalui IA-CEPA terhadap peningkatan kerja sama antara kedua negara. Meskipun keduanya membahas kerja sama bilateral Indonesia-Australia melalui IA-CEPA, penelitian yang akan dilakukan akan lebih spesifik dalam mengkaji dampak WHV terhadap kerja sama bilateral di bidang pendidikan dan pariwisata.

Keempat, penelitian yang berjudul “**Hubungan Bilateral Indonesia – Australia: Kepentingan Australia dalam Meratifikasi *Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* Tahun 2019**” yang ditulis oleh Astari Marisa pada tahun 2020. Penelitian ini membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, dengan fokus pada kepentingan Australia dalam meratifikasi IA-CEPA tahun 2019. Artikel tersebut menggambarkan sejarah hubungan bilateral antara kedua negara, termasuk periode tegang pada tahun 2013 yang mengakibatkan penundaan aktivitas IA-CEPA. Australia memiliki peran dominan dalam hubungan ini, dan kepentingannya sangat terlihat dalam kerja sama bilateral, terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan.

Perbedaan utama dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokusnya. Jurnal tersebut lebih menekankan pada aspek politik dan ekonomi dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia, khususnya dari perspektif Australia dalam meratifikasi IA-CEPA. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan akan lebih difokuskan pada analisis implementasi WHV melalui IA-CEPA terhadap peningkatan kerja sama antara kedua negara, dengan lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan dan pariwisata. Meskipun keduanya membahas hubungan bilateral Indonesia-Australia melalui IA-CEPA, penelitian yang akan dilakukan akan lebih spesifik dalam mengkaji dampak WHV terhadap kerja sama bilateral di bidang pendidikan dan pariwisata.